

## ***THE INFLUENCE OF STUNTING REDUCTION PROGRAM PERFORMANCE ON THE GROWTH OF UNDER-FREE CHILDREN IN ROKAN HULU DISTRICT***

### **PENGARUH KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PENURUNAN STUNTING TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA DI KABUPATEN ROKAN HULU**

Amir Syamsuadi<sup>1)</sup>, Yulia Febrianita\*<sup>2)</sup>, Ade Febriani<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Psikosospol, Universitas Abdurrah, Jl.Riau Ujung, Pekanbaru  
email : [amir.syamsuadi@univrab.ac.id](mailto:amir.syamsuadi@univrab.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Abdurrah, Jl.Riau Ujung, Pekanbaru  
email : [yulia.febrianita@univrab.ac.id](mailto:yulia.febrianita@univrab.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Abdurrah, Jl.Riau Ujung, Pekanbaru  
email : [ade.febriani@univrab.ac.id](mailto:ade.febriani@univrab.ac.id)

#### ***Abstract***

*Post was designated as the only stunting locus area in the province Riau in 2017 Rokan Hulu Regency took various steps policy. These efforts are actualized by the efforts of the local government building collaborative synergies between regional government apparatus organizations in an integrated stunting reduction effort. This study analyzes and describes the role of cross-sectors in the convergence of the acceleration of decline Stunting in Rokan Hulu District. The approach in this research is qualitative research in the form of field research by collecting sources of primary data and secondary data through in-depth interviews and reviews document. The results of the research show that the Government of Rokan Hulu Regency carry out efforts to reduce stunting in a structured and comprehensive manner, such as: Identify the distribution of stunting, program availability, and constraints in the implementation of integrated nutrition interventions, develop an activity plan for improve the implementation of integration of nutrition interventions, organize consultations stunting, providing legal certainty for villages to carry out their roles and village authority in integrated nutrition interventions, ensuring the availability and the functioning of cadres who assist the village government in implementation integrated nutrition interventions at the village level, improving data management systems stunting and coverage of interventions, measuring growth and development of children under five and publication of stunting figures and conducting a review performance of program implementation and activities related to stunting reduction periodic. Implementation of the Program to Accelerate the Reduction of Stunting in Districts Rokan Hulu is viewed based on policy standards and targets; resource; inter-organizational communication and activity strengthening; the characteristics of the implementing agency; implementor disposition; and social, economic and political conditions.*

**Keywords:** Role, Cross, Sector, Convergence, Stunting

#### **Abstrak**

Posko yang ditetapkan sebagai satu-satunya daerah lokus stunting di Provinsi Riau pada tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu mengambil berbagai langkah kebijakan. Upaya tersebut diwujudkan dengan upaya pemerintah daerah membangun sinergi kolaboratif antar organisasi perangkat pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan stunting secara terpadu. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan peran lintas sektor dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan dengan mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder melalui

wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan upaya penanggulangan stunting secara terstruktur dan komprehensif, seperti: Mengidentifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan intervensi gizi terpadu, mengembangkan rencana kegiatan peningkatan pelaksanaan intervensi gizi terpadu, menyelenggarakan konsultasi stunting, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terpadu, memastikan ketersediaan dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan terpadu intervensi gizi di tingkat desa, perbaikan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi, pengukuran tumbuh kembang balita dan publikasi angka stunting serta melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting secara periodik. Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu dilihat berdasarkan standar kebijakan dan sasaran; sumber; penguatan komunikasi dan aktivitas antar organisasi; karakteristik badan pelaksana; disposisi pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Kata kunci: Peran, Lintas, Sektor, Konvergensi, Stunting

## **PENDAHULUAN**

Stunting membawa dampak pada perkembangan seseorang di masa dewasanya kemampuan kognitif yang rendah, mudah terinfeksi penyakit, menjadi kurang produktif dan tentunya akan melahirkan anak-anak yang kondisinya juga sama, sehingga masalah stunting menjadi penghambat dari Pembangunan Manusia Indonesia yang cerdas dan produktif. Berdasarkan laporan hasil penilaian kinerja upaya penurunan stunting di Provinsi Riau dalam lampiran surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappedalitbang/II/2417. Kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerangkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Riau mengalami penurunan yakni dari 36,8% pada tahun 2013 menjadi 27,4% pada tahun 2018 dengan penurunan sebesar 9,4% selama 5 Tahun. Tahun 2019 Kementerian Kesehatan dalam Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) mengeluarkan data proporsi stunting (TB/U) pada balita menurut provinsi dimana Provinsi Riau tergolong masih tinggi dengan angka persentase 23,95%.

Penanganan penurunan stunting di Provinsi Riau sudah dimulai pada tahun 2018 pada 10 (sepuluh) desa lokus di Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada tahun 2019 ditetapkan 10 (sepuluh) lokus di Kabupaten Kampar. Tahun 2021 sudah ditetapkan sebanyak 162 desa/kelurahan lokus di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan oleh oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia sebagai kabupaten lokus stunting dari 100 kabupaten kota di Indonesia dan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau.

Hal tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan berbagai pihak, utamanya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Berdasarkan data BPS Rokan Hulu Tahun 2022 Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi interim sebesar 570.952 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, 139 desa, dan 6 kelurahan dengan luas wilayah Luas wilayah kabupaten Rokan Hulu seluas 7.588,13 Km<sup>2</sup> Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes), dengan tingkat prevalensi stunting 58,9%. Pada tahun 2018 berdasarkan data Riskesdas, tingkat prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu menjadi 27,3%

Pada data tahun 2019 Kementerian Kesehatan dalam Studi SSGBI mengeluarkan data tingkat persentase prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu turun menjadi 24,37%, 2021 hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Kabupaten Rokan Hulu turun menjadi 25.8%. Strategi nasional (Stranas) percepatan pencegahan stunting dengan lima pilarnya melalui program intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan hasil yang diharapkan berupa

peningkatan cakupan intervensi pada sasaran kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) meliputi intervensi pemenuhan konsumsi gizi, perbaikan pola asuh, kemudahan akses pelayanan kesehatan dan perbaikan kondisi kesehatan lingkungan termasuk akses sumber air minum layak dan akses sanitasi layak. Berdasarkan data elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu menggambarkan perkembangan prevalensi stunting pada bulan Agustus tahun 2020 dan tahun 2021 yakni peningkatan paling tinggi berada di Kecamatan Rokan IV Koto dari 0,6% menjadi 5,1%, dengan prevalensi mencapai 4,5% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kecamatan yang mengalami penurunan stunting yang terbesar adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 5,6% dari 5,7 % menjadi 0,1 %.

Menurut survey e-PPGBM Tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu bahwa Faktor determinan terhadap balita stunting adalah jumlah anggota rumah tangga yang merokok, balita tidak memiliki jaminan kesehatan, balita belum imunisasi lengkap, balita tidak mempunyai jamban sehat dan balita tidak punya air bersih. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan karena belum optimalnya tumbuh kembang anak, tingginya tingkat gizi buruk dan stunting, sehingga akan berdampak terjadinya kehilangan generasi (loss generation) dimasa mendatang. Kualitas hidup manusia erat kaitannya dengan sektor kesehatan. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sebesar 70,06% tahun. Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,06% per Tahun.

Penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Isu stunting saat ini menjadi isu nasional karena berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dimasa yang akan datang. Di Rokan hulu telah dilakukan program -program penurunan angka stunting. Oleh karena itu peneliti ingin mengidentifikkasi Pengaruh Kinerja Pelaksanaan Program Penurunan Stunting terhadap Tumbuh Kembang Anak Balita Di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pengembangan Percepatan Penurunan Stunting dalam pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Creswell dalam melakukan analisis penelitian kualitatif diperlukan beberapa langkah yaitu: pertama, mempersiapkan data yang akan digunakan; kedua, membaca secara keseluruhan seluruh data yang telah dikumpulkan; ketiga, mengolah data untuk dibagi menjadi bagian-bagian yang akan dideskripsikan; keempat, mengaitkan seluruh hasil pembagian untuk kemudian dideskripsikan; kelima, menyajikan deskripsi dalam laporan kualitatif, dan keenam, menginterpretasikan makna dari data yang sudah disajikan (Creswell 2014). Bentuk dari penelitian ini adalah field reserach (penelitian lapangan)(Simanjuntak dan Sosrodiharjo 2014) yang juga dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data terkait Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti untuk memilah siapa saja yang akan diwawancarai sesuai dengan tema penelitian ini. Sebab, tidak semua orang dapat memahami permasalahan ini. Pada data primer teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya wawancara interview dan dokumentasi. Penelitian memiliki 23 informan.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data dilakukan dengan 1.Mengorganisasikan data ke dalam kategori; 2.Menjabarkan ke dalam unit-unit; 3.Melakukan sintesa; 4.Menyusun ke dalam pola; 5.Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari; dan 6.Membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Melakukan Identifikasi Sebaran Stunting, Ketersediaan Program, Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Integrasi Intervensi Gizi di Kabupaten Rokan Hulu

Aplikasi e-HDW mempermudah Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan penerimaan rumah tangga 1.000 HPK.Menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi masyarakat Mempermudah masyarakat dan Pemerintah Desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan stunting di Desa. Memudahkan pemerintah pusat dan daerah dalam memantau kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting 1.000 HPK di tingkat Desa secara riil dan ter-update.

Mempermudah Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan kebijakan tentang program/kegiatan pencegahan stunting dengan berbasis data riil dan terupdate. Aplikasi tersebut berguna dalam melakukan kegiatan pemetaan desa berupa Pemetaan informasi banyaknya dusun beserta jumlah penduduk, pemetaan sasaran 1.000 HPK dan Sasaran PAUD, pemetaan kondisi Polindes/Poskesdes di Desa dari ketersediaan layanan dan Tenaga Kesehatan, pemetaan PAUD di desa baik dari jumlah tenaga pendidik dan Murid PAUD, pemetaan Kondisi ketersediaan air bersih dan sanitasi di Desa. Terkait persoalan sanitasi Menurut Anton, ST MM selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut: *“...Anggaran yang ditetapkan oleh dalam peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2022 tentang analisis standar belanja pemerintah Kabupaten rokan Hulu yakni berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lainnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) per kegiatan sebanyak 300 Juta Rupiah harapannya dapat memperbaiki sanitasi kesehatan air minum masyarakat”* Pemetaan keberadaan Posyandu di desa, baik dari jumlah Posyandu, Jumlah Kader, Ketersediaan alat dan Jumlah Sasaran di Posyandu. Menurut Basron pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Rokan Hulu yang juga merupakan Kepala Desa Babussalam terkait penggunaan aplikasi tersebut disampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut: *“..dapat kita ketahui berbagai aplikasi disiapkan oleh Kementerian Desa termasuk diantaranya Aplikasi e-HDW ini, Aplikasi e-HDW ini merinci hasil-hasil kesepakatan berupa daftar kegiatan yang harus ditindak lanjuti berkaitan dengan kesepakatan dalam rembuk stunting tingkat Desa tentu ini sangat memberikan manfaat banyak kepada desa termasuk pendataan masyarakat miskin..”* (Wawancara, 01 September 2022)

Hal tersebut dilakukan agar memudahkan mendapatkan data dan cakupan intervensi serta memberikan rekomendasi dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan. Kemudian dinas pemberdayaan dan pemerintah desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu memanfaatkan Aplikasi e-HDW atau e-Human Development Worker merupakan aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT yang digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia untuk memantau dan mendukung peningkatan konvergensi Intervensi Gizi Kepada Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran). Persoalan stunting adalah persoalan nyata bagi pemerintah daerah, hal tersebut relevan dengan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu H. Sukiman dalam wawancaranya berikut ini: *“...Masalah stunting merupakan masalah krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Oleh sebab itu, perlu penanganan serius dalam*

*mengatasi permasalahan stunting. Karena penurunan stunting bisa dicapai hingga tuntas, dengan sinergisitas semua pihak. Sebagai kepala daerah saya menginstruksikan setiap dinas-dinas dan OPD untuk tanggap terhadap persoalan stunting ini”* (Wawancara, 01 September 2022) Untuk mengidentifikasi sebaran stunting Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Dinas pemberdayaan dan pemerintah desa (DPMPD) dengan melakukan pendataan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melihat sebaran stunting di Kabupaten Rokan Hulu yakni untuk mendapatkan data terkait cakupan dan keterpaduan intervensi gizi pada rumah tangga 1000 HPK. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh dr. Bambang Triono selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut: *“Beberapa Dinas melakukan identifikasi sebaran stunting yang Terdiri Dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu instruksi dilakukan melalui peran masing-masing OPD serta dilakukan melalui koordinasi Tim TPPS Kabupaten Rokan Hulu”* (Wawancara, 01 September 2022)

Adapun Program dari dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yakni menasar kepada remaja putri di sekolah sekolah hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Nana Sumpena, SKM Kabid KS. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dalam wawancaranya berikut ini: *“...Remaja putri kelak akan menjadi seorang ibu dan pastinya melewati proses hamil, melahirkan, hingga merawat anaknya untuk tumbuh lebih sehat. Kondisi stunting sendiri banyak terjadi pada proses tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan seorang ibu. Minimnya pengetahuan seorang ibu bisa disebabkan minimnya pemahaman konsep parenting pada usia remaja. Remaja putri yang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat diberikan pemahaman awal konsep parenting secara sederhana.* (Wawancara, 08 November 2022)

Hal senada terkait peran dinas kesehatan disampaikan oleh Adhka Dartini, S.ST., MM Kasi. Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dan Dosen UPP dalam wawancaranya berikut ini: *“...Kita tahu bahwa sektor pendidikan menjadi bagian dalam tim penurunan stunting di Indonesia. Selain itu, konsep parenting perlu diberikan kepada remaja putri. Edukasi konsep parenting mampu menjadi stimulus dan pemahaman dini terkait pencegahan stunting. Adapun cara yang bisa dimulai dengan memperkenalkan konsep berkeluarga dimana ada rasa kasih sayang dan tanggung jawab kepada keluarga terlebih kepada pemenuhan nutrisi keluarga. Cara-cara pengasuhan juga perlu diberikan kepada remaja putri mengingat mereka akan mengasuh anak setelah melahirkan. Praktik baik yang bisa dilakukan dapat dicontohkan kepada adiknya di rumah atau bagaimana menyayangi anak-anak di bawah usianya. Kegiatan ini juga didampingi dengan kegiatan Gerakan Minum Vitamin Serentak (GERMITAK) dan kegiatan ini juga berjalan di masa pandemi Covid-19 yakni bertujuan untuk intervensi dini dan menekan anemia pada remaja serta adanya materi sosialisasi terkait pernikahan kami menganggap kelompok sasaran remaja putri mampu berkontribusi terhadap pencegahan stunting secara dini..* (Wawancara, 31 Agustus 2022)”

Selain program tersebut hal lain yang juga sangat penting adalah dukungan layanan (Supra Desa) terhadap pelayanan KIA, PAUD, Air Bersih & Sanitasi, dan Jaminan Kesehatan. Penyusunan daftar peserta dalam Rembuk Stunting tingkat desa, Kepala Desa, Kader, Tim Perumus, BPD, Unsur, dll, Berisi daftar kegiatan- kegiatan atau usulan yang akan dibahas di dalam Rembuk Stunting. Aplikasi berfungsi sebagai alat diagnostik seperti Memberikan analisa kondisi rumah tangga hasil dari Pemetaan sasaran 1.000 HPK dalam status Indikator dan Konvergensi, termasuk Keluarga Rentan, Memberikan hasil analisis data kondisi fasilitas pelayanan KIA melalui Posyandu/ Poskesdes, dan fasilitas layanan PAUD yang ada di Desa.

## 2. Memastikan Tersedianya Dan Berfungsinya Kader Yang Membantu Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Intervensi Gizi Terintegrasi Di Tingkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu

Upaya pencegahan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk menasar penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk menasar penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung. Intervensi gizi spesifik menasar penyebab langsung terjadinya stunting yang meliputi: 1) Kecukupan asupan makanan dan gizi; 2) Pemberian makan, perawatan dan pola asuh; dan 3) pengobatan infeksi/penyakit. Untuk memastikan tersedianya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi di Kabupaten Rokan Hulu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan merujuk kepada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Dimana Seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM). Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Alirman, SE selaku Kasi Perencanaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu dalam wawancaranya berikut ini: *"...tersedianya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi di Kabupaten Rokan Hulu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan merujuk kepada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Dimana Seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) (Wawancara, 31 Agustus 2022).*

KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan BAB VI pasal 24 Perbup No.02 Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021. Kriteria KPM adalah sebagai berikut: a. berasal dari warga masyarakat desa setempat. b. berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya; c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat; d. pendidikan minimal SLTP.

Adapun tugas KPM diantaranya sebagai berikut: a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting; b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK; c. memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas; d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif; e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak; f. memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan pelayanan gizi spesifik dan sensitif; g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa. Selain KPM ada

juga Rumah Desa Sehat (RDS) (1) RDS merupakan social riast bersama pegiat pemberdayaan masyarakat Desa dan pelaku pembangunan Desa.

Pegiat pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting. RDS mempunyai fungsi sebagai : a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan; b. ruang literasi kesehatan di Desa. c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa; d. forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan e. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan masyarakat. Menurut Arie Afriadi, S.Pi., MM selaku Kabid. Pemberdayaan Unit ekonomi, Masyarakat (PUEM) DPMPD Kabupaten Rokan Hulu berkenaan dengan RDS menyatakan bahwa: *“....Didalam peraturan bupati bahwa RDS berkedudukan di Desa, dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa Dan Agenda musyawarah nya adalah untuk membahas dan menyepakati anggota RDS yang berasal dari unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa, serta pengurus harian RDS. Pembentukan RDS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa..”* (Wawancara, 31 Agustus 2022)

Adapun Kegiatan-kegiatan RDS antara lain : a. pusat pembelajaran masyarakat bidang kesehatan di Desa; b. literasi Kesehatan; c. penyebaran informasi kesehatan; d. promosi kesehatan; dan e. advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan Untuk Pengelolaan RDS antara lain : a. sebagai sekretariat bersama; b. simpul hubungan antar lembaga di Desa; c. penginformasian hasil-hasil kegiatan RDS; d. pertanggungjawaban Kegiatan RDS; e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; Pengorganisasian dalam rangka konvergensi pencegahan stunting dilakukan melalui pengembangan Sekretariat Bersama Rumah Desa Sehat. Pengorganisasian ini difasilitasi oleh PD dan/atau PLD dibantu oleh KPM Pemetaan kondisi penyedia layanan dan pelaku konvergensi pencegahan stunting dilakukan bersamaan dengan sosialisasi.

Pemetaan dilakukan melalui wawancara, pertemuan kelompok serta penggalian data sekunder. Pertemuan kelompok-kelompok kecil pada tahapan ini dapat dilakukan untuk memperkaya pemikiran tentang pentingnya upaya konvergensi pencegahan stunting sebagai bagian dari proses analisis situasi lokal Desa. Metodologi partisipatif yang dilakukan dalam pemetaan tersebut dilakukan melalui kegiatan: a). penyusunan peta sosial, b). diskusi tematik/FGD; dan c). observasi/kunjungan langsung. Penyedia layanan yang dimaksud adalah Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga, sebagai sarana penyediaan layanan di Desa bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai bentuk dukungan atas efektivitas terjadinya layanan yang berkualitas dan terpenuhinya layanan tersebut bagi setiap sasaran yang membutuhkan. Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga merupakan kelembagaan masyarakat Desa dan komunitas lokal yang menjadi sarana penyediaan layanan berbasis masyarakat di Desa.

Pemantauan layanan konvergensi pencegahan stunting di Desa dilakukan melalui ketiga sarana tersebut. Saat ini layanan Posyandu dan PAUD umumnya sudah berjalan dan memiliki landasan regulasi masing-masing, Namun Kelompok Keluarga yang juga memiliki peran strategis masih belum dikembangkan dan berjalan sesuai kebutuhan target program tertentu dengan kurang terpadu. Selama ini bentuk pengembangan Kelompok Keluarga dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti: Dasa Wisma, Kelompok Penerima Manfaat Program PKH, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan sebagainya. Meskipun komunitas keluarga dalam sebuah cakupan layanan Posyandu, PAUD, Pos Bina Keluarga Balita (BKB), Dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), serta kelompok arisan dan komunitas profesi juga masuk dalam kategori Kelompok Keluarga ini. Intinya, bahwa diperlukan kepedulian masyarakat di lingkungan keluarga sasaran

untuk bersama-sama saling peduli dalam mengatasi permasalahan sesama yang membutuhkan, khususnya terhadap masalah stunting.

Setelah serangkaian pertemuan kelompok kecil (refleksi kelembagaan) dalam upaya menggugah kesadaran kritis terhadap pentingnya sebuah saluran komunikasi antar kelembagaan lokal yang representatif, setara, aspiratif serta membelajarkan dan dapat menjadi pusat peningkatan kapabilitas dalam pencegahan stunting, maka disusunlah agenda rembuk kelembagaan yang membahas: a. Peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku konvergensi; b. Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS); dan c. Penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda kerja RDS. Mekanisme pembentukan dan pengorganisasian RDS dilakukan dengan mempedomani Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat. Pembangunan dinamika kelompok ini penting dilakukan agar pembentukan RDS didasari atas kesadaran dan inisiatif masyarakat sesuai potensi dan kebutuhan lokal. Pemahaman akan RDS sebagai nama generik (dapat disesuaikan dengan kesepakatan istilah lokal) dan menjadi sekretariat bersama pelaku lintas sektor konvergensi pencegahan stunting di tingkat Desa harus dipahami secara utuh dalam proses pembangunan dinamika kelompok ini.

Konvergensi pencegahan stunting melalui RDS pada intinya adalah memperkuat kepentingan masyarakat Desa untuk mengadvokasi pendayagunaan keuangan dan aset Desa khususnya Dana Desa untuk pencegahan stunting. Konsolidasi kepentingan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK; b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK; c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan stunting di Desa dalam Rembuk Stunting di Desa; d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dalam perencanaan pembangunan di Desa; dan e. advokasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK

### 3. Melakukan Pengukuran Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Balita Dan Publikasi Angka Stunting di Kabupaten Rokan Hulu

Untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak balita serta melakukan kegiatan publikasi angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan, dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Juga Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita terstruktur dan periodik.

Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 terdapat 27,3 % atau 999 anak stunted dari 3,666 balita yang ditimbang, pada tahun 2019 turun menjadi 24,3 % Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Rokan Hulu terus turun, dimana pada tahun 2020 angka stunting turun 6 persen menjadi 18,4 persen dan di tahun 2021 tinggal 17,9 persen atau 540 Anak Stunted dari 3.015 Balita yang ditimbang. Daftar penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Penurunan prevalensi *stunting* Kabupaten Rokan Hulu  
Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Balita yang dilimbang	Jumlah Balita Stunted	Persentase
2018	3666	999	27,3%
2019	3675	896	24,37 %
2020	3680	678	18,4%
2021	3015	540	17,9%

Sumber: (Tp-pkk.rokanhulukab 2022)

Hasil pengukuran serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam gerakan Bersama pencegahan stunting. Tujuan pengukuran dan publikasi angka stunting adalah: 1. Mengetahui status gizi anak sesuai umur, sehingga Kader Posyandu dapat a. Memantau kemajuan pada tingkat individu. b. Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal. c. Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku. 2. Mengukur prevalensi stunting di tingkat Desa, yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai bahan untuk: a. Peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya. b. Pemecahan masalah dan memantau proses perencanaan di level Desa hingga Kabupaten. c. Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program. Rembuk Pengawasan konvergensi pencegahan stunting di Desa dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan, dengan melakukan pembahasan sebagai berikut : Efektivitas pengukuran Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali oleh kader kesehatan atau kader pembangunan manusia terlatih dan divalidasi oleh Bidan Desa. Hal tersebut merupakan pilihan yang paling optimal dan menjamin ketersediaan data rutin. Pelaksanaan pengukuran Sesuai pedoman tata laksana pengukuran yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan kualitas data yang diperoleh dapat dibentuk operator atautim kendali mutu harus dilatih secara komprehensif, berkala dan berjenjang.

Hasil pengukuran tinggi badan dengan Tikar Pertumbuhan di Posyandu menjadi informasi awal situasi stunting di Desa. Data Pasca pengukuran stunting, perlu dilakukan penyampaian informasi yang memuat hasil pengukuran stunting secara berjenjang dari Posyandu ke tingkat yang lebih tinggi, baik secara manual maupun online. Data-data tersebut harus terus diperbarui agar selalu mutakhir, sesuai dengan perubahan yang terjadi pada balita yang dijumpai pada saat dilakukan pengukuran di platform pemantauan tumbuh kembang balita. Pemanfaatan data hasil pengukuran Data hasil pengukuran digunakan untuk menghasilkan analisis sebagai berikut: a. Menilai kemajuan pada tingkat individu; untuk menunjukkan bahwa seorang anak sedang tumbuh dan berkembang secara normal atau bermasalah atau berisiko sehingga harus segera dinilai ulang. b. Menilai kemajuan pada tingkat keluarga; untuk menunjukkan pola persoalan kesehatan di tingkat keluarga yang berkontribusi pada kejadian stunting. c. Menilai kemajuan pada tingkat RT/RW/Kelurahan/Desa; untuk menunjukkan kemajuan masalah kesehatan prioritas yang dihadapi oleh masing-masing perangkat desa.. Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran hasil analisis data selanjutnya digunakan untuk diseminasi dan publikasi hasil pengukuran. Berbagai saluran penyebaran informasi yang tersedia di Desa dapat dimanfaatkan untuk diseminasi dan publikasi hasil pengukuran angka stunting tersebut.

#### 4. Melakukan Review Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Terkait Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu

Langkah Review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan secara periodik dalam hal ini dilakukan pertahun. Berdasarkan hasil analisis penelitian sebagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan terkait

penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan upaya monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Audit Stunting Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Juli Erni selaku ASN DPPKB dalam wawancaranya berikut ini: “... *Audit tersebut ditetapkan melalui surat keputusan ketua pelaksana Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Rokan Hulu No: Kpts.476/DPPKB/002/2022 tentang Tim Audit Stunting Kabupaten Rokan Hulu. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah ketua pelaksana TPPS kabupaten Rokan Hulu yakni Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hulu...*” (Wawancara, 08 November 2022)

Tim pelaksana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu sebagai ketua tim, sebagai wakil ketua tim ditunjuk kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang ditunjuk sebagai tim teknis kepala puskesmas se kabupaten Rokan Hulu, camat se kabupaten Rokan Hulu, Penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan KB se Kabupaten Rokan Hulu dari perangkat desa, Tim Pendamping Keluarga Se Kabupaten Rokan Hulu dari perangkat desa, kader posyandu dari perangkat desa, kepala bidang pengendalian penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang KB Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, Kepala bidang KS Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, kepala bidang kesehatan masyarakat (kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, kepala bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagian Tim Pakar terdiri dari Dokter spesialis anak, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, psikolog dan ahli gizi. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Untuk penanggung jawab dalam hal ini ketua TPPS Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dan menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan tindak lanjutnya. Untuk ketua tim audit memiliki tugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan. Wakil ketua bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan berbagai pihak terkait seperti Rumah sakit jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, polindes, klinik dan pelayanan sehat lainnya. Tim teknis melakukan persiapan, menyusun konsep TIM Audit Stunting dan menyusun penjadwalan pelaksanaan kemudian tim teknis melakukan pelaksanaan dan koordinasi dengan tim pakar berupa, penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit, telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis, melakukan kunjungan lapangan untuk koordinasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif, penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus secara selektif, penyusunan laporan pelaksanaan audit stunting secara berkala.

Kemudian tim pakar bertugas melaksanakan kajian kasus yang dituangkan dalam kertas kerja audit, memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit, melakukan kunjungan lapangan untuk koordinasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif (jika diperlukan dan memungkinkan), mendiseminasikan hasil audit kasus stunting dan juga Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

## **SIMPULAN**

Konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu adalah sinkronisasi waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan setiap organisasi perangkat daerah, keterbatasan dan tumpang tindih program anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah serta manajemen akurasi data dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Dan Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara terstruktur dan menyeluruh seperti

Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk stunting, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting dan melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting secara periodic.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Abdurrahman. 2008. "Sosiolinguistik: Teori, peran, dan fungsinya terhadap kajian bahasa sastra." *LINGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 3(1).
- Azalia, D. 2017. "Pengaruh institusi regional terhadap konvergensi kebijakan antarnegara: studi kasus ASEAN Open Skies." *Jurnal Politik* 2(2): 307–36.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif." *Jurnal teknologi pendidikan* 10(1): 46–62.
- Creswell, John W. 2014. "Qualitative, quantitative and mixed methods approaches." Faqih, Achmad. 2010. *Kependudukan: Teori, fakta dan masalah*. Deepublish. Harbani, Pasolong.
2007. "Teori Administrasi Publik, Bandung, CV."
- Iqbal, Hasan, -m. 2002. "Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya." Iqbal, Hasan. 2002. "Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya." Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iqbal, Muhammad, dan Rahmadani Yusran. 2021. "Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 3(2): 109–16.
- Kementerian PPN/ Bappenas. 2018. "Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota." *Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting (November)*: 1–51.
- Kusumawati, Ani, Tachir Hendro Pudjiantoro, dan Dian Nursantika. 2017. "Sistem Informasi Kependudukan Pada Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut." In *Prosding Seminar Nasional Komputen dan Informatika*, Lumendek,
- Destrina. 2018. "Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 Di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara." *JURNAL POLITICO* 7(3).
- Permanasari, Yurista et al. 2020. "Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas." *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 30(4): 315–28.
- Prayudi, Made Aristia, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, dan Luh Putu Ekawati. 2018. "Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 2(4): 449–67.
- Rahmawati, Tuti. 2020. "Pengarutamaan Konsep Reformasi Sistem Kesehatan dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2021." *Majalah Media Perencana* 1(1): 82–96.
- Ramdhany, Irfan, dan Titik Djumiarti. 2016. "Faktor-Faktor Dalam Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Drainase Di Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* 5(2): 938–54.
- Rozikin, Mochamad. 2019. "Kolaborasi Antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif (Studi di Kota Malang)." *PANGRIPTA Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan* 2(2): 49–57.
- Ruaida, Nilfar. 2018. "Gerakan 1000 hari Pertama Kehidupan Mencegah Terjadinya Stunting

- (Gizi Pendek) di Indonesia.” *Global Health Science* 3(2): 139–51. Sahroji, Qotrun Nada, Rahmat
- Rudyk Nababan. 2022. “Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Pemerintah dan Politik* 7(1): 34–39. Sari, Dianti Desita.
2017. “GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA DI WILAYAH RT. 001/RW. 07 KELURAHAN PAPANGGO PASCA SOSIALISASI KELUARGA BERENCANA.” *JURNAL AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA* 3(1).
- Schroder, P. 2010. *Strategi Politik*. Edisi Ceta. ed. Avantie Agoesman. Jakarta: Friedrich-Naumann. Simanjuntak,
- Siswanto, Bedjo. 2021. *Pengantar manajemen*. Bumi Aksara. Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. 2013. “*Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*.” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, A G. 2010. “*Analisis Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar. “
- Sugiyono.” 2009. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*, Revisi Alfabeta.